

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Implementasi Pelelangan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah.

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termaksud melalui media elektronk dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun, dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.¹

Bentuk lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang pada zaman Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut (lelang naik) yang biasa dilakukan dipegadaian konvensional. Lelang seperti ini

¹ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 304/Kmk.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Bab I, Pasal 1

masih diperdebatkan apakah sesuai dengan syariah atau tidak, karena ada indikasi persetujuan pada penawaran pertama yang menyetujui tawaran penjual.

Lelang dapat juga berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai pada akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun). Lelang seperti inilah yang disepakati sudah sesuai syariah, dan selanjutnya dijadikan pola lelang dipegadaian syariah.

Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai harga penawaran lelang (HPL) : Bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan) serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang.

Pasar lelang (auction market) sendiri di definisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipenjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (reservation price), di Pegadaian Konvensional kita sebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL): bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML).

Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersengkongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.²

Pada prinsipnya, Syariah Islam membolehkan jual-beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*, dan akad *Bai' Muzayadah* pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ibnu Qudamah, Ibn Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan adanya *Ijma'* (kesepakatan) ulama' tentang bolehnya jual-beli secara lelang.

Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok diantaranya:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
3. Kepemilikan/Kuasa penuh pada barang yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan

² M. Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*(Jakarta: Kuwais, 2012), h. 136.

7. Tidak menggunakan cara yang menjerumuskan kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Segala bentuk rekayasa curang tidak sah dalam praktik lelang dikategorikan para ulama yang disebut *najasy* (komplotan/trik kotor lelang), yang diharamkan Nabi SAW, atau juga dapat dimasukkan dalam kategori *Riswah* (sogok).³

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Pegadaian Syariah Landungsari pada saat yang telah ditentukan di muka apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Pada saat masa habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan, dan
2. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.

Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Pegadaian Syariah Landungsari yang terdiri dari :

1. Pokok pinjaman
2. Sewa modal atau bunga
3. Biaya lelang

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka

³ Anshori *Gadai Syariah di Indonesia*, h.98-101

barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Pegadaian Syariah Landungsari.⁴

B. Kondisi PT. Pegadaian (Persero)

1. Kondisi Pegadaian Syariah Landungsari

Pemerintah baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian. Pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf Von Westerode sebagai kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai.

Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP10/1990 tanggal 10 April 1990 sampai dengan terbitnya PP103 tahun 2000 Pegadaian berstatus sebagai Perum dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang.

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya

⁴ Arini Pramasaputri, wawancara (Landungsari, 04 Mei 2013).

PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.⁵

Pegadaian Syariah saat ini sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, maka Pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau Rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan Rahn/gadai syariah, maka Perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan Rahn yang bagi Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk Rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan Divisi Usaha Lain.)

Pegadaian Cabang Syariah Landungsari didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya muslim yang melakukan

⁵ Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, h. 218

transaksi keuangan berupa pinjaman atau lainnya dengan menggadaikan suatu barangnya dengan prinsip syariah dan bebas bunga. Peresmian Pegadaian Cabang Syariah Landung Sari pada 5 April 2006 yang bertempat di jalan Tlogomas. Dan kemudian pindah pada tanggal 5 April 2011 yang bertempat di jalan Ruko Landungsari Indah Kav 7, yang pada saat ini telah mempunyai 3 unit pembantu cabang yaitu Bungul, Kauman, Gadang.⁶

Dengan hadirnya Pegadaian Cabang Syariah Landungsari yang menawarkan pendanaan cepat dan praktis ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dengan prinsip syariah. Selain itu, diharapkan atas Pegadaian Cabang Syariah Landungsari mampu bekerja lebih profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tanpa meninggalkan ciri khusus yaitu memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai/*rahn* yang sesuai dengan mottonya "Pegadaian Syariah, benar caranya berkah hasilnya"

2. Visi dan Misi

Untuk mewujudkan Pegadaian yang inovatif, dinamis dan profitable, maka visi Pegadaian Syariah pada tahun 2013 adalah menjadikan Pegadaian Syariah sebagai Champion dalam pembiayaan mikro berbasis syariah bagi masyarakat menengah ke bawah.

Adapun misi dari perusahaan Pegadaian adalah membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya

⁶. Arini Pramasaputri, wawancara (Landungsari, 04 Mei 2013).

golongan menengah ke bawah, melalui kegiatan utama berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dan fiducia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.⁷

3. Produk-produk Pegadaian Syariah

Adapun produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Cabang Landungsari adalah sebagai berikut:⁸

- a. *RAHN*, Penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada prinsip syariah.
- b. *ARRUM*, (*ar-rahn* untuk usaha mikro kecil), yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk Usaha Mikro Kecil berprinsip syariah dengan objek jaminan berupa BPKB.
- c. *AMANAH*, Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor bagi karyawan.
- d. *MULIA*, (*Murâbahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi), yaitu penjualan emas logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai, ataupun pola angsuran dalam jangka waktu tertentu.

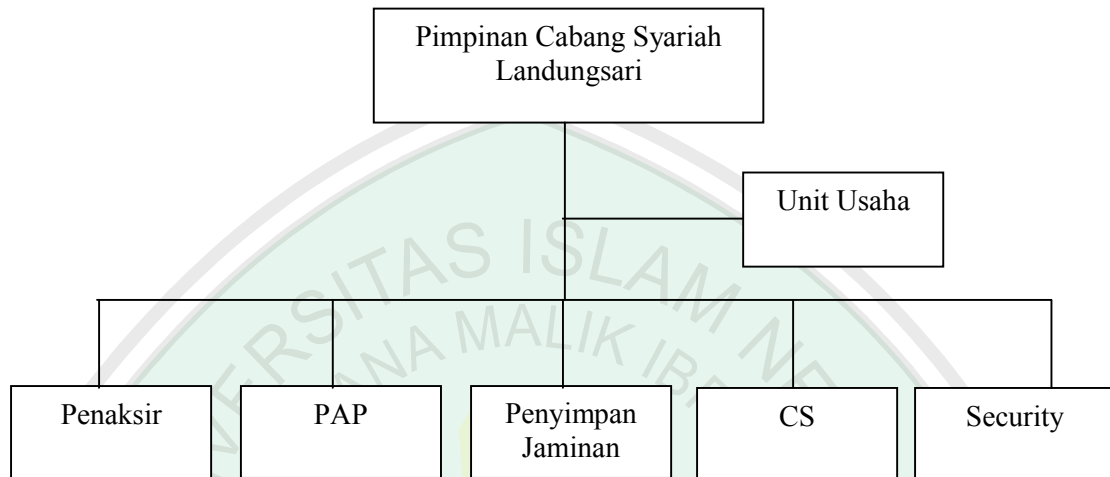
4. Struktur Organisasi

Untuk menjadikan Pegadaian Cabang Syariah sebagai lembaga keuangan non bank yang maju dan dinamis, maka lembaga ini harus terstruktur dengan baik agar tugas masing-masing divisi dapat berjalan

⁷ www.pegadaian.co.id, diakses tanggal 15 Mei 2013.

⁸ Sumber data diambil dari brosur-brosur Pegadaian Cabang Syariah.

lancar dan sistematis sesuai dengan harapan. Adapun struktural Pegadaian Cabang Landungsari adalah sebagai berikut:⁹



Keterangan:

Pimpinan : Mussarifatun, S.Sos
 Penaksir : Arini Pramasaputri
 PAP : Reni Tisna Paramita
 Penyimpan Jaminan : Supandi
 CS : Andik
 Security : Ardi Kurniawan

5. Paparan Data

a. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pelelangan Barang Di Pegadaian Syariah Landungsari.

Dalam hal ini akan kami paparkan tentang bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang di pegadaian syariah Landungsari.

⁹ Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS)

Menurut pendapat ibu Siti Maryam tentang perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelepasan barang adalah;

“Kalau saya mas..dulu itu saya menggadaikan TV dipegadaian swasta, disurat saya, tertulis batas waktu sampai 4 (empat) bulan, apabila tidak diambil maka barang saya dilelang. Tapi belum 4 (empat) bulan, saya mau nebus barang saya, e barang saya sudah dilelang dahulu, tanpa sepengetahuan saya, alasanya barang saya itu sudah jatuh tempo makanya barang saya dilelang dan yang tertulis disurat itu salah ketik, terus saya tidak terima, saya adu mulut dipegadaian tapi pihak sananya tetap ngotot bahwa barang saya sudah jatuh tempo. Terpaksa saya langsung pulang tanpa bawa apa-apa dan di rumah saya dimarahi suami saya. Tapi dalam hati, saya tidak terima dengan perlakuan seperti itu.”¹⁰

Menurut pendapat ibu Darmi para nasabah yang merasa pernah dirugikan oleh pihak pegadaian mengatakan;

“Aku titipno barang iku (emas 10 gram) padahal aku dewe yo bayar, aku bayar tak cicil yo gak tau telat. Tapi pas wayah e jatuh tempo aku gak duwe dewet di gawe nebus barang kui, lah aku jalu dipermanjang nang pegadaian e terus oleh dike'i jatah waktu 2 (dua) hari, tapi pas hari e tak tebus sore-sore barang e kok wes dilelang jare e seng jogo terus, sisa lelanganne kui gak di balekno padahal barangku payune kui sakjuta lah aku nyileh 500 rb, lah turah e kui lo kok g' di balikno nang q padahal turah e akeh, turs yo lek koyok ngono kui yo aku yo ws pasrah mas aku yo g' ngerti opo-opo aku wong awam.”¹¹

Menurut ibu surti mengatakan bahwa:

“Gini mas saya kan nasabah di pegadaian pada waktu saya membayar bunga saya merasa tidak di hargai oleh salah satu pegawainya, padahal niat saya kan Cuma ingin membayar bunganya saja, tapi malah dapat perlakuan seperti itu (dibeda-bedakan antara nasabah pinjaman banyak dengan nasabah pinjaman sedikit) dari salah satu pegawainya. Saya tidak terima diperlakukan seperti itu, saya marah dengan pegawainya dan keluar untuk melaporkan ke atasannya sebaiknya pegawai itu dipecat atau dihukum saja, atau dipindah kemanah pokoknya tidak ditempat saya”.¹²

¹⁰ Siti Maryam, wawancara (Sidoarjo, 13 Mei 2013).

¹¹ Darmi, wawancara (Sidoarjo, 13 Mei 2013).

¹² Surti, wawancara (Sidoarjo, 15 Mei 2013).

Mengenai Masalah yang dialami oleh nasabah yang merasa dirugikan atas barang jaminan yang dilelang mereka (nasabah) ingin meminta ganti rugi atas apa yang dilakukan oleh pihak Pegadaian yakni berupa harga dari barang jaminan tersebut.

Lain halnya dengan pendapat Arini Pramasaputri yang menjabat sebagai penaksis dalam Pegadaian Syariah Landungsari Malang:

“Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah di pegadaian syariah yaitu nasabah diberikan waktu untuk perpanjangan surat perjanjian dan nasabah cuma membayar ijarahnya (biaya simpan barang) saja dan waktunya itu sampai 10 hari. Apabila nasabah tidak bisa membayar maka diberikan surat tunda lelang, dalam surat tunda lelang ini nasabah diberi waktu untuk melunasi atau memperpanjang surat perjanjian tersebut dan waktunya itu sampai 10 hari dan nasabah diwajibkan untuk membayar ijarah, didalam surat tunda lelang terdapat identitas nasabah dan jumlah pinjaman nasabah.”

“Batasan tunda lelang cuma 1 (satu) kali maksudnya yakni nasabah mengajukan tunda lelang dan diberi waktu 10 hari kemudian setelah 10 hari apabila nasabah tidak bisa melunasi maka mau tidak mau barang nasabah tersebut harus dilelang.”¹³

Sama halnya dengan yang Arini Pramasaputri. Reni Tisna Paramita berpendapat sama karena itu termaksud dalam peraturan perusahaan yang disahkan oleh dewan direksi PT. Pegadaian. Untuk masalah jangka waktu dalam gadai sampai barang itu dilelang oleh perusahaan menurut pendapat Reni Tisna Paramita adalah;

“Jangka waktu dalam gadai yakni 120 hari (empat bulan) apabila dalam waktu empat bulan nasabah belum bisa menebus maka diberi waktu lagi selama empat bulan dan seterusnya untuk jangka waktunya tidak terbatas samapi beberapa tahunpun bisa diperpanjang, asalkan nasabah bisa membayar ijarah dan biaya pembuatan surat (administrasi).”

“Jadwal lelang dipegadaian syariah ini dilakukan tiga kali dalam satu bulan untuk tanggalnya tidak pasti akan tetapi untuk tanggal

¹³ Arini Pramasaputri, wawancara (Landungsari, 04 Mei 2013).

lelangnya rata-rata tanggal 5, 15, 25. Tanggal-tanggal tersebut didasarkan pada ijarah yang di pegadaian syariah ijarahnya (biaya simpan barang) per10 hari. Dan tanggal lelang antara syariah dan konvensional itu berbeda syariah itu per10 harinya diadakan lelang sedangkan konvensional itu per15 hari diadakan lelang.”¹⁴

Proses lelang dalam praktiknya menurut Arini Pramasaputri mengatakan;

“Untuk proses lelang barang gadai di pegadaian syariah itu apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan, pelelangan dilakukan setelah pemberitahuan lima hari sebelum tanggal lelang, pemberitahuan itu dilakukan melalui telephon apabila telephonnya tidak aktif, maka pegadaian meberikan surat pemberitahuan lelang, apabila alamatnya pindah maka pegadaian langsung melelangnya.”

“Proses pelelangan dilakukan secara tertutup yakni nasabah bisa langsung membeli barang lelang kepegadaian dengan cara datang langsung kepegadaian, kemudian nasabah akan disuruh memilih barang yang mau dibelinya, atau bisa juga barang lelang tersebut dibeli secara langsung oleh toko emas, apabila harga emas setabil atau naik. Seandainya harga emas turun seperti sekarang ini maka barang lelang dibeli langsung oleh perusahaan maksudnya disimpan dahulu apabila harga emas mulai stabil atau naik maka langsung ditawarkan kenasabah. Lelang itu sendiri harganya bisa lebih murah dari harga pasar. Artinya, masyarakat yang akan mendapatkan barang yang lebih murah dan kualitasnya terjamin sangat besar.”¹⁵

Harga dalam menentukan lelang di Pegadaian Syariah Landungsari malang, menurut Reni Tisna Paramita adalah;

“Dan harga emas yang dilelang bisa lebih murah daripada harga emas yang ada di toko, karena tidak ada ongkos pembutan dan pajak, sedangkan ditokoh emas ada biaya ongkos pembutan dan pajak. Harga barang lelang itu sudah ditentukan oleh kanwil, yang disebut sebagai harga dasar dari kanwil dan harga tersebut setiap hari ada, dari harga ini lah pegadaian bisa menentukan harga barang tersebut dan ditawarkan kepada pembeli baik itu toko ataupun nasabah.”

¹⁴ Reni Tisna Paramita, wawancara (Landungsari, 04 Mei 2013).

¹⁵ Arini Pramasaputri, wawancara (Landungsari, 04 Mei 2013).

Sedangkan aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan menurut Arini Pramasaputri adalah;

“untuk menanggapi masalah tentang barang yang belum waktunya dilelang, dilelang oleh pegawainya itu dalam perusahaan di PT Pegadaian Syariah diatur dalam peraturan direksi pasal 92 yang menerangkan bahwa apabila mengeluarkan barang jaminan tanpa didahului pelunasan kredit maka dijatuhi sanksi SP-III/PHK. Karena itu termaksud dalam merugikan nasabah dan mencemarkan nama baik perusahaan.”

“Sedangkan untuk masalah sisa lelang, nasabah pasti akan diberitahu oleh para pegawai, dan jangka waktu sisa lelang itu adalah 1 (satu) tahun, apabila di Pegadaian Syariah dalam waktu (1) tahun tidak diambil maka akan diserahkan lembaga ZIS oleh perusahaan, sedangkan di pegadaian Konvensional masuk dalam uang perusahaan. Apabila tidak diberitahukan kenasabah maka panetian lelang akan kena sanksi SP-I/SP-II.”

“Masalah yang terjadi di atas yakni nasabah merasa tidak di hargai oleh salah satu pegawainya. Maka pegawainya itu sudah kena SP-I, kemudian SP-II, apabila sangat merugikan perusahaan maka akan di PHK/ SP-III.”¹⁶

Masalah tentang nasabah, Para Pegawai di Pegadaian Syariah Landungsari Malang, menyalahkan mereka (nasabah). Karena menurut para pegawai dalam SBR atau surat perjanjian nasabah sudah ada tentang tanggal jatuh tempo dan pada waktu akad sudah diberitahukan tentang tanggal jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo nasabah sudah dibritahukan lewat telpon sandainya tidak aktif maka melalui surat. Mengenai sisa barang jaminan yang dilelang itu diberikan kepada nasabah dan nasabah sudah diberitahukan melalui telpon atau melalui surat. Apabila tidak diberitahukan kepada nasabah maka itu termasuk kesalahan kami (para pegawai), dan seandainya sudah diberitahukan tapi nasabah tidak diambil

¹⁶ Arini Pramasaputri, wawancara (Landungsari, 04 Mei 2013).

maka nasabah sudah mengikhlaskan hasil sisa lelang tersebut. Jadi menurut para pegawai nasabah yang salah atas pelelangan barang jaminan tersebut.¹⁷

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara diatas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang di Pegadaian Syariah Landungsari yaitu memberitahu nasabah waktu jatuh tempo, perpanjangan, surat tunda lelang barang jaminan, AYD (aktifa yang dialihkan) yang maksudnya penjualan barang lelang masih belum mencukupi pinjaman karena harga emas turun dan BLP (barang lelang milik perusahaan) maksudnya penjualan barang lelang terdapat sisa dan sisanya dikembalikan kepada masyarakat sampai 1 (satu) tahun, apabila tidak diambil maka akan di serahkan ke lembaga ZIS oleh perusahaan.

b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Landungsari

Bagaian ini kami paparkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Landungsari Malang:

Menurut Arini Pramasaputri adalah: *“Tinjauan hukum Islam dalam Pegadaian syariah di Indonesia itu berdasar pada Al-Quran, Hadist dan juga fatwa DSN menyatakan, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan.”*¹⁸

¹⁷ Arini Pramasaputri, wawancara (Landungsari, 04 Mei 2013).

¹⁸ Arini Pramasaputri, wawancara (Landungsari, 04 Mei 2013).

Praktik mengenai hukum islam dalam perlindungan terhadap nasabah itu sudah diterapkan dalam Pegadaian, seperti mereka menjamin semua barang yang digadaikan apabila barang itu kebakaran, pencurian atau hilang atas kesalahan maka pihak Pegadaian akan mengganti 120% dari harga barang itu, yang 20% itu untuk mengganti barang peninggalan atau barang warisan turuntemurun. Dan dalam barang jamina tersebut sudah diansuransikan oleh pihak Pegadaian untuk mengatisipasi sesuatu yang tidak diinginkan.¹⁹

Pegadaian Syariah Landungsari sudah menggunakan prinsip Syariah yaitu akad rahn dan akad ijarah, yang terdapat pada buku Pedoman operasional gadai syariah yang diterbitkan oleh perum pegadaian. Pada saat pelunasan pinjaman *rahin* (pemilik barang/nasabah) diwajibkan membayar uang pinjamannya serta kewajiban lain yaitu *ijarah*.

Apabila sampai dengan jatuh tempo akad, tidak melunasi pinjamannya dan tidak juga melakukan perpanjangan maka Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang melaksanakan proses lelang dengan terlebih dahulu memberitahukan pada *rahin* (pemilik barang/nasabah) bahwa *marhun* (barang jaminan) akan dilelang. Apabila hasil lelang tidak cukup untuk melunasi maka *rahin* wajib membayar sisa kewajiban pada *murtahin* dan sebaliknya bila ada kelebihan hasil penjualan *marhun* maka *rahin* berhak menerima kelebihan.²⁰

¹⁹ Reni Tisna Paramita, *wawancara* (Landungsari, 04 Mei 2013).

²⁰ Arini Pramasaputri, *wawancara* (Landungsari, 04 Mei 2013).

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara mengenai tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Landungsari yaitu memberi perlindungan kepada nasabah secara syariah.

C. Analisis Data

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pelelangan

Barang Di Pegadaian Syariah Landungsari.

Berdasarkan temuan data yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa narasumber mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang yaitu

a. Nasabah diberikan Perpanjangan SBR

Nasabah diberikan waktu untuk memperpanjang tenggang waktu surat perjanjian atau SBR, sebelum jatuh tempo. Jangka waktu gadai ditetapkan selama maksimum empat bulan. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 45-80,- (empat puluh lima sampai delapan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman. Dalam hal ini nasabah diberi kelonggaran, yaitu:

- 1) Mengansur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah biaya administrasi,
- 2) Melaksanakan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu empat bulan,

3) Bisa juga hanya membayar jasa simpanannya dengan bea administrasi saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.²¹

b. Surat tunda lelang

Nasabah di berikan bentuk perlindungan apabila nasabah tidak/ belum mampu memperpanjang atau melunasi barang jaminan sebelum jatuh tempo dengan cara, Surat tunda lelang maksudnya ialah penundaan sebelum barang jaminan dilelang oleh perusahaan. Surat tunda lelang ini di beri batas waktu selama 10 hari, nasabah harus melunasi atau memperpanjang SBR tersebut sehingga barang jaminan nasabah aman tidak dilelang oleh Pegadaian Syariah Landungsari.²²

c. AYD (aktifa yang dialihkan) dan BLP (barang lelang milik perusahaan)

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang, maka Pegadaian Syariah Landungsari melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dilelang. Lelang di Pegadaian Syariah Landungsari dilakukan atas dasar relah dari pihak nasabah karena Pegadaian Syariah Landungsari menganut asas dalam hukum kontrak Syariah yaitu asas keridhoan, segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan diantara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas

²¹ Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, h. 237.

²² Arini Pramasaputri, *wawancara* (Landungsari, 04 Mei 2013)

ini, maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara yang batil.²³

AYD (aktifa yang dialihkan) yang maksudnya penjualan barang lelang masih belum mencukupi pinjaman karena harga emas turun, jika harga emas turun maka barang jaminan nasabah yang tidak bisa melunasi atau meperpanjang dibeli oleh perusahaan karena apabila dijual maka merugikan perusahaan. Barang jaminan yang dibeli oleh perusahaan disimpan sampai harga emas naik. Apabila harga barang jaminan tidak mencukupi pinjamannya maka nasabah wajib membayar sisa pinjamannya.

BLP (barang lelang milik perusahaan) maksudnya selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan bea lelang merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadian Syariah Landungsari akan menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

d. Pedoman oprasional gadai syariah dalam Perlindungan nasabah

Pedoman oprasional gadai syariah sudah mencakup tentang perlindungan konsumen yang ada pada undang-undang no 8 tahun 1999, yakni melindungi kepentingan konsumen atau nasabah.²⁴ Dalam

²³ Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 47.

²⁴ Abdul Halim Barkatulah *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran* (Bandung: Nus Media, 2008), h. 18.

buku pedoman oprasional mencangkup tentang hak-hak nasabah yaitu:²⁵

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan
- b. Hak untuk mendapatkan informasi
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak nasabah untuk dilindungi dari persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha secara tidak jujur, perlindungan ini dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan atau kepastian hukum bagi dirinya.²⁶

Semua hak-hak tersebut diberlakukan dan diterapkan oleh pegadaian syariah. Apabila semua hak tersebut dilanggar oleh para pegawainya maka akan terkena sanksi oleh perusahaan, dan sanksi tersebut diatur dalam pasal 15 tentang kewenangan menetapkan sanksi.²⁷

Ketentuan diatas sudah menjadi aturan perusahaan yang sudah ada pada pedoman operasional gadai syariah yang diterbitkan oleh dewan Direksi Pegadaian.

Perusahaan yang berbadan hukum yakni yang berbentuk PT seperti PT Pegadaian harus mempunyai aturan sendiri yang disebut

²⁵ Shidarta. *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2006), h. 20.

²⁶ Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 25.

²⁷ Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS), h. 10.

dengan aturan perusahaan, maksud dari Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Perusahaan, yang di dalamnya memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan, Sebuah Peraturan Perusahaan baru dikatakan sah dan mengikat Perusahaan dan Karyawan apabila telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Aturan perusahaan harus berisikan tentang hak dan kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban karyawan, syarat kerja, tata tertip perusahaan. Apabial itu berhubungan dengan nasabah harus memuat tentang hak untuk melindungi nasabah.²⁸

Permasalahan yang peneliti teliti mengenai perlindungan hukum maka hukum atau aturan yang digunakan adalah hukum perusahaan itu sendiri bukan mengacu pada hukum perlindungan konsumen kerana hukum yang mengatur tentang hal yang lebih khusus mengalahkan aturan yang bersifat umum, yang istilahnya *Lex Specialis derogat legi general*. Hukum khusus yaitu hukum atau aturan perusahaan itu sendiri sedangkan hukum umumnya adalah ketentuan atau aturan hukum tersebut berlaku bagi orang banyak tanpa disebutkan nama-nama individu/orang tertentu, dalam hal ini adalah hukum perlindungan konsumen UU no 8 tahun 1999.

Hukum perlindungan konsumen digunakan ketika hukum perusahaan tersebut tidak digunakan atau tidak diatur dalam peraturan perusahaan. Sedangkan dalam perusahaan PT Pegadaian itu mengatur

²⁸ <http://legalakses.com/membuat-peraturan-perusahaan/>, diakses tanggal 25 Juni 2013.

tentang perlindungan hukum bagi nasabah yang terdapat pada pedoman oprasional gadai syariah.

Alasan peneliti memakai ini karena dalam undang-undang atau legulasi dari ketentuan undang-undang perlindungan konsumen disebutkan pada pasal 64 tentang ketentuan peralihan yang berbunyi “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dalam pasal tersebut menyebutkan tentang diperbolehkannya memakai peraturan perusahaan sepanjang aturan tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah. Apabila peraturan perusahaan tersebut tidak melindungi konsumen (nasabah) maka baru memakai undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Peneliti sepakat menggunakan peraturan perusahaan sebagai aturan untuk melindungi nasabah di Pegadaian Syariah Landungsari Malang tidak menggunakan undang-undang perlindungan konsumen, dan dasar dari apa yang peneliti ungkapkan adalah pasal 64 undang-undang perlindungan konsumen tentang ketentuan pralihan.

Tabel 1.2

Informan (1)	Bentuk Perlindungan (2)	Kolaborasi dengan UU dan Hukum Islam (3)
Arini Pramasaputri	a) Nasabah diberikan waktu untuk memperpanjang b) Nasabah diberikan surat tunda lelang. c) AYD dan BLP (2)	Pedoman oprasional gadai syariah sudah mencakup tentang perlindungan konsumen yang ada pada undang-undang no 8 tahun 1999, yakni melindungi kepentingan konsumen atau nasabah. Dalam hukum Islam melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi yang sesuai dengan salah satu <i>maqasid al-shariah</i> (objektif syariah) yaitu <i>hifzul al-maal</i> (melindungi harta benda atau properti). (3)
Reni Tisna paramita	Sama seperti yang Arini Pramasaputri jelaskan karena itu aturan dalam perusahaan dan hak nasabah dalam melakuakn perjanjian.	Pedoman oprasional gadai syariah sudah mencakup tentang perlindungan konsumen yang ada pada undang-undang no 8 tahun 1999, yakni melindungi kepentingan konsumen atau nasabah. Dalam hukum Islam melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi yang sesuai dengan salah satu <i>maqasid al-shariah</i> (objektif syariah) yaitu <i>hifzul al-maal</i> (melindungi harta benda atau properti).
Siti Maryam	Tidak teriam tentang barangnya yang belum waktunya dilelang dilelang oleh Pegadaian	KHES memberi perlindungan kepada nasabah dalam hal pelelangan dibahas yang ada dalam Pasal 366
Darmi	Pasrah karena tidak mengerti apa-apa tentang gadai.	KHES mengenai tentang lelang akan tetapi pasal 367 ayat 4
Surti	Tidak teriam atas perlakuan salah satu pegawai	melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi yang sesuai dengan salah satu <i>maqasid al-shariah</i> (objektif syariah) yaitu <i>hifzul al-maal</i> (melindungi harta benda atau properti).

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Landungsari

Prinsip-prinsip dalam hukum Islam tentang gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasanya mengalami kesulitan. Rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah *Ijab Qabul*, *Aqid*, *marhun*, *marhun bih*. Menurut Syafi'iyah semua tambahan yang menyatu dengan rahin, termaksud kedalam rahin. Karena tambahan tersebut mengikuti pokoknya dan tidak bisa dipisahkan dari brog. Adapun tambahan yang terpisah dari pokoknya, termaksud kedalam rahn. Berakhirnya akad gadai karena hal-hal sebagai berikut gadai telah di-*fasakh* (dibatalkan) oleh pihak murtahin, Rusaknya barang, penjualan secara paksa.

Jadi prinsip pokok dari Rahn adalah:

1. Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai.
2. Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang.

3. Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seijin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan/penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.

Kondisi dilapangan terkait dengan perlindungan hukum dalam pelelangan di Pegadaian Syariah Landungsari adalah perpanjangan, surat tunda lelang barang jaminan, AYD (aktifa yang dialihkan) yang maksudnya penjualan barang lelang masih belum mencukupi pinjaman karena harga emas turun dan BLP (barang lelang milik perusahaan) maksudnya penjualan barang lelang terdapat sisa dan sisanya dikembalikan kepada masyarakat sampai 1 (satu) tahun, apabila tidak diambil maka akan di serahkan ke lembaga ZIS oleh perusahaan. apabila barang jaminan itu kebakaran, pencurian atau hilang atas kesalahan Pegadaian, maka pihak Pegadaian akan mengganti 120% dari harga barang itu dan pada barang jaminan tersebut sudah diansuransikan oleh pihak Pegadaian untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan. Pegadaian Syariah Landungsari berprinsip pada fatwa DSN tentang rahn dan rahn emas.²⁹

Mengenai aspek di lapangan yakni Pegadaian Syariah landungsari yang bertentangan prinsip rahn adalah masalah tunda lelang dalam teori atau dalam buku-buku gadai tidak menyebutkan tentang adanya tunda

²⁹ Arini Pramasaputri, *wawancara* (Landungsari, 04 Mei 2013)

lelang, tunda lelang ini hanya ada dalam aturan perusahaan PT. Pegadaian. Alasan kenapa PT. Pegadaian memberikan aturan mengenai tunda lelang bagi nasabah yang tidak bisa memperpanjang atau melunasi barang jaminan adalah. *Pertama*, untuk melindungi barang nasabah agar tidak di lelang oleh perusahaan. *Kedua*, Pegadaian lebih mengutamakan nasabah karena tanpa nasabah perusahaan tidak akan berkembang dan juga mempertahankan nasabah lebih sulit dari pada mencari nasabah baru.

Perlindungan Perlindungan nasabah merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi nasabah atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan. Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat Islam harus mendapatkan perlindungan atas suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.³⁰

Islam sebagai cara hidup yang sempurna telah mengatur hubungan sesama manusia (muammalah) dengan bermacam-macam kontrak (akad). Hal ini menunjukkan bahwa perkara muammalah merupakan suatu hal yang juga penting dalam syariat Islam. Kontrak

³⁰ <http://uai.ac.id/2011/04/13/opini-ilmiah-hukum/> diakses tanggal 25 Juni 2013

sangat diperlukan manusia dalam bertransaksi. Diantaranya fungsinya adalah untuk:

- (1) Melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi
- (2) Membedakan antara suatu kontrak yang syah secara syariah dengan kontrak lainnya.

Fungsi yang pertama dari kontrak diatas sangat sesuai dengan salah satu *maqasid al-shariah* (objektif syariah) yaitu *hifzul al-maal* (melindungi harta benda atau properti). Hal ini dikarenakan agar suatu transaksi syah secara syariah diperlukan keridhaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sementara fungsi kontrak yang kedua adalah untuk membedakan antara suatu transaksi dengan transaksi lainnya yang mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda.

Ayat mengenai perlindungan dalam bertransaksi atau dalam akad adalah firman Allah SWT dalam Surat Al-Nissa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³¹

Alasan peneliti menggunakan ayat diatas karena ayat tersebut cocok dengan permasalahan yang peneliti teliti yaitu sisa hasil lelang

³¹ QS. al-Nissa’ (4): 29 .

yang tidak diberikan kepada nasabah dan lelang barang jaminan yang belum waktunya jatuh tempo. Peneliti menggunakan *Qiyas* dalam menganalisis ayat ini, sebelumnya peneliti menjelaskan tentang *Qiyas*. *Qiyas* adalah membandingkan satu hal dengan yang lain, atau penyamaan terhadap dua hal. *Qiyas* harus memunahi empat rukun.

Pertama, Al-ashl, yaitu dalil *nash* baik itu dari Al-Quran atau Al-Hadist yang terkait dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah Al-Nissa ayat 29. *Kedua, al-far'u*, yaitu permasalahan yang belum ada dalilnya, dalam hal ini masalah tentang sisa hasil lelang yang tidak diberikan kepada nasabah dan lelang barang jaminan yang belum waktunya jatuh tempo. *Ketiga, Hukum ashl* adalah Hukum syar'i yang terdapat pada *Al-ashl*, dalam hal ini adalah ayat yang artinya “*janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil*”. *Keempat, 'illah* sama-sama mempunyai hubungan yaitu tidak diperbolehkan memakan harta dengan cara yang batil.

Sifat dari لَا تَأْكُلُوا adalah memakan, mengkorupsi, mengambil, memanipulasi, merugikan dan lain sebagainya. Tapi yang di gunakan oleh peneliti tentang masalah ini adalah merugikan. Merugikan adanya motif perbuatan dengan cara tidak dibenarkan secara Syariat. *'illah* yang terdapat pada masalah *furu'iyah* diatas adalah merugikan orang lain, sehingga dapat di *Qiyaskan* dengan *'illah* yang ada pada *ashl* berupa adanya perbuatan merugikan orang lain. Oleh karenanya dapat

disimpulkan bahwa *al-ashl* dan *al-far'u* sama-sama memiliki '*illah* yang sama yaitu merugikan orang lain (nasabah).

Jadi *Qiyas* yang digunakan adalah *Qiyas al-Musawi* (*Qiyas* yang setara) ialah *Qiyas* yang memiliki kekuatan '*illah* yang sama, yang terdapat pada *al-ashl* dan *al-far'u*, sehingga hukumnya juga sama pada *al-ashl* dan *alfar'u*.³² Dapat dipahami bahwasanya nasabah harus dilindungi dari perbuatan yang merugikan nasabah oleh perusahaan. Karena tanpa nasabah atau tanpa konsumen perusahaan akan bangkrut.

Mengenai pelelangan barang jaminan yang sudah jatuh tempo maka *al-Murtahin* meminta *ar-raahin* untuk melunasi utangnya, jika *ar-raahin* bersedia melunasi utangnya, maka tidak ada masalah lagi. Namun jika *ar-Raahin* tidak melunasinya dengan menunda-nunda maka hakim memaksa untuk menjual *al-Murtahin*. Menurut Menurut ulama Hanafiyyah, ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabila, Abu Yusuf, Abu Yusuf dan Muhammad, hakim langsung menjualnya tanpa perlu memaksa *ar-Raahin* dengan memenjarakannya atau memukulnya atau mengancamnya.

Mengenai wakil *ar-Raahin* dalam menjualkannya Menurut ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah, hakim bisa memaksa wakil *ar-Raahin* untuk menjual *al-Marhuun*. Sedangkan menurut ulama

³² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 176.

Syafi'iyah dan ulama Hanabila, hakim tidak bisa memaksa wakil *al-Raahin* untuk menjual *al-Marhuun*.³³

Dalam gadai ada syarat bahwa apabila barang gadai tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima gadai berhak untuk menjualnya. Seperti dalam kaidah-kaidah fiqih tentang muamalah³⁴

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مَقْتَضَا هُ فَهُوَ جَائِزٌ

“setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan”

Barang sisa lelang barang jaminan diberikan kepada nasabah apabila tidak diambil maka barang tersebut diwakafkan tapi sebelum itu pegawai harus menginformasikan kepada nasabah yang barangnya terlelang. Apabila tidak diinformasikan kepada nasabah maka barang itu termaksud pencurian barang milik umum.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas mengenai pelelangan barang jaminan pada pasal 367 ayat 2 yang menyatakan “apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual secara paksa melalui lelang Syariah”. Adapun untuk kelebihan dibahas dalam pasal 367 ayat 4 “ kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangan menjadi kewajiban pemberi gadai”. Pegadaian Syariah Landungsari sudah menerapkan isi yang ada pada KHES mengenai tentang lelang akan tetapi pasal 367 ayat 4 tidak

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 216.

³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 137.

digunakan oleh Pegadain Syariah Landungsari yang mengenai barang sisa lelang itu diberikan kepada nasabah setelah dikurangi ijarah.

KHES memberi perlindungan kepada nasabah dalam hal pelelangan dibahas dalam Pasal 405 yang berbunyi “ jika penerima gadai tidak memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi.” Maksudnya ialah bahwa nasabah diberi perlindungan yaitu diperbolehkan menuntut ganti rugi kepada pihak Pegadaian apabila nasabah merasa dirugikan dalam berbagai hal.³⁵

Barang sisa lelang yang tidak diberikan kepada nasabah kerana nasabah tidak diberitahukan atau barang nasabah yang dilelang sebelum jatuh tempo itu termaksud dalam kategori pencurian besar.

Diantara pencurian yang tergolong paling besar adalah melakukan pencurian terhadap harta milik umum. Bagi orang-orang yang mencuri atau mengelapkan sesuatu, harus mengembalikan barang tersebut ketempat semula, setelah bertaubat kepada Allah SWT, baik dikembalikan dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jika tidak mampu mengembalikan barang tersebut ketempat semula atau kepemilikannya maka harus menyedekahkan barang tersebut dan berniat agar pahalanya diberikan kepada pemilik barang itu.³⁶

³⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* , h. 111.

³⁶ Ibrahim bin Fathi, *Uang Haram* (Jakarta: Amzah, 2006), h. 339.

Kaidah-kaidah fiqih yang membahas mengenai mengambil manfaat barang gadai adalah

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”³⁷

Jadi hasil sisa lelang yang tidak diberikan kepada nasabah karena ketidak tahuan nasabah tentang adanya sisa hasil lelang maka hasil tersebut termaksud dalam uang haram karena termaksud dalam riba.

³⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqi*, h. 138.